



**LAPORAN KEUANGAN  
SEMESTER II TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
(099193)**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Ahmad Yani No. 133**

**Telp. 0627 22201/21053 Fax. 0627 21053**

**Dairi - Sumatera Utara 22212**

**e-mail : [keuanganpn.sidikalang@yahoo.com](mailto:keuanganpn.sidikalang@yahoo.com)**


## Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Tingkat UAKPA satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-31/PB/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2024. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang  
  
Eva Rina Sihombing

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar .....   | i       |
| Daftar Isi .....   | ii      |
| Pernyataan Tanggung Jawab .....  | iii     |
| Ringkasan Laporan Keuangan.....  | iv      |
| I. Laporan Realisasi Anggaran .....  | 6       |
| II. Neraca.....  | 7       |
| III. Laporan Operasioanal.....   | 8       |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....   | 9       |
| V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....  | 10      |
| A. Penjelasan Umum .....   | 11      |
| A.1 Profil Pengadilan Negeri Sidikalang .....                                    | 11      |
| A.2 Nilai Kinerja Organisasi .....   | 11      |
| A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....                                 | 11      |
| A.4 Basis Akuntansi .....  | 11      |
| A.5 Dasar Pengukuran .....   | 11      |
| A.6 Kebijakan Akuntansi.....   | 11      |
| B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....                       | 16      |
| B.1 Pendapatan.....  | 17      |
| B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak .....  | 17      |
| B.2 Belanja.....   | 18      |
| B.2.2 Belanja Barang.....  | 10      |
| C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....   | 19      |
| C.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran .....                                   | 20      |
| C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas.....  | 20      |
| C.3 Persediaan.....  | 20      |
| C.4 Uang Muka dari KPPN.....   | 21      |
| C.5 Ekuitas.....   | 21      |
| D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional .....                             | 21      |
| D.1 Beban Persediaan .....   | 22      |
| D.2 Beban Barang dan Jasa.....   | 22      |
| D.3 Beban Pemeliharaan.....  | 23      |
| D.4 Beban Perjalanan Dinas .....   | 23      |
| E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....                        | 24      |
| E.1 Ekuitas Awal .....   | 24      |
| E.2 Surplus (Defisit) LO .....   | 24      |
| E.3 Dampak Kumulatif Penambahan Kebijakan/kesalahan Mendasar.....                | 24      |
| E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas .....                               | 24      |
| E.5 Transaksi Antar Entitas .....  | 24      |
| E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) ..... | 24      |
| E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....  | 24      |
| E.6 Ekuitas Akhir .....  | 24      |



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**


Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi  
Sumatera Utara. [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang  
  
Eva Rina Sihombing

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidikalang Semester II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-31/PB/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2024. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.17.799.000,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.17.799.000,- atau mencapai 91 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.19.480.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 146.576.225,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 147.810.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.217.000,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.2.217.000; Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.0 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.2.217.000,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 17.799.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 152.386.657,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. (134.587.657,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (134.587.657,-)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.3.085.000,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (134.587.657,-) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 133.719.157,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.2.217.000,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024  
DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                             | CATATAN     | TA 2024            |                    |                           | % thd Angg    | TA 2023            |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
|                                    |             | ANGGARAN           | REALISASI          | REALISASI DI ATAS/(BAWAH) |               | REALISASI          |
| <b>PENDAPATAN</b>                  | <b>B.1</b>  |                    |                    |                           |               |                    |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak      | B.1.1       | 19.480.000         | 17.799.000         | (1.681.000)               | 91,37%        | 42.693.000         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b> |             | <b>19.480.000</b>  | <b>17.799.000</b>  | <b>(1.681.000)</b>        | <b>1</b>      | <b>42.693.000</b>  |
|                                    |             |                    |                    |                           |               |                    |
| <b>BELANJA</b>                     | <b>B.2.</b> |                    |                    |                           |               |                    |
| Belanja Barang                     | B.2.1       | 147.810.000        | 146.576.225        | (1.233.775)               | 99,17%        | 122.842.500        |
|                                    |             |                    |                    |                           |               |                    |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>              |             | <b>147.810.000</b> | <b>146.576.225</b> | <b>(1.233.775)</b>        | <b>99,17%</b> | <b>122.842.500</b> |



Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                              | CATATAN | 2024             | 2023             | Kenaikan/<br>Penurunan | %              |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>ASET</b>                         |         |                  |                  |                        |                |
| <b>ASET LANCAR</b>                  |         |                  |                  |                        |                |
| Persediaan                          | C.1     | 2.217.000        | 3.085.500        | (868.500)              | (28,15)        |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>           |         | <b>2.217.000</b> | <b>3.085.500</b> | <b>(868.500)</b>       | <b>(28,15)</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                  |         | <b>2.217.000</b> | <b>3.085.500</b> | <b>(868.500)</b>       | <b>(28,15)</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                    |         |                  |                  |                        |                |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>      |         |                  |                  |                        |                |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek      |         | -                | -                | -                      | -              |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>             |         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
| <b>EKUITAS</b>                      |         |                  |                  |                        |                |
| Ekuitas                             | C.2     | 2.217.000        | 3.085.500        | (868.500)              | (28,15)        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               |         | <b>2.217.000</b> | <b>3.085.500</b> | <b>(868.500)</b>       | <b>(28,15)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> |         | <b>2.217.000</b> | <b>3.085.500</b> | <b>(868.500)</b>       | <b>(28,15)</b> |



Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

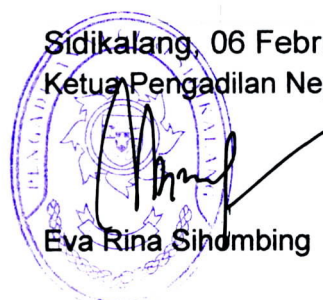
III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024**  
**DAN 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN   | CATATAN | 2024                 | 2023                | Kenalkan/<br>Penurunan | %              |
|--|---------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                            |         |                      |                     |                        |                |
| <b>PENDAPATAN</b>                                      |         |                      |                     |                        |                |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | D.1     | 17.799.000           | 42.693.000          | (24.894.000)           | -              |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                               |         | <b>17.799.000</b>    | <b>42.693.000</b>   | <b>(24.894.000)</b>    | <b>(88,31)</b> |
| <b>BEBAN</b>   |         |                      |                     |                        |                |
| Beban Persediaan                                       | D.2     | 45.370.432           | 35.323.955          | 10.046.477             | 28,44          |
| Beban Barang dan Jasa                                  | D.3     | 75.066.255           | 64.025.000          | 11.041.255             | 17,25          |
| Beban Perjalanan Dinas                                 | D.4     | 31.950.000           | 25.580.000          | 6.370.000              | 24,90          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                    |         | <b>152.386.687</b>   | <b>124.928.955</b>  | <b>27.457.732</b>      | <b>21,98</b>   |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI<br/>KEGIATAN OPERASIONAL</b> |         | <b>(134.587.687)</b> | <b>(82.235.955)</b> | <b>52.351.732</b>      | <b>(63,66)</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                        |         |                      |                     |                        |                |
| Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar            |         | -                    | -                   | -                      | -              |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>   |         | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>          |         | <b>(134.587.687)</b> | <b>(82.235.955)</b> | <b>(52.351.732)</b>    | <b>63,66</b>   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                  |         | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                              |         | <b>(134.587.687)</b> | <b>(82.235.955)</b> | <b>(52.351.732)</b>    | <b>63,66</b>   |

Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024  
DAN 31 Desember 2023**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                     | CATATAN | 2024          | 2023         | Kenaikan/<br>Penurunan |
|----------------------------|---------|---------------|--------------|------------------------|
| EKUITAS AWAL               | E.1     | 3.085.500     | 505.000      | 2.580.500              |
| SURPLUS/DEFISIT LO         | E.2     | (134.587.657) | (82.235.955) | (52.351.702)           |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS    | E.3     | 133.719.157   | 28.382.955   | 105.336.202            |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.4     | (868.500)     | 2.110.000    | (2.978.500)            |
| EKUITAS AKHIR              | E.5     | 2.217.000     | 2.615.000    | (398.000)              |



Sidikalang, 06 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Eva Rina Sihombing

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil Pengadilan Negeri Sidikalang

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai instansi vertikal bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang menjalankan misi yang meliputi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
5. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pengadilan.

*Basis Akuntansi*

#### A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sidikalang Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber

daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan  
Akuntansi**

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Kantor Xxx adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-  
LRA**

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-LO**

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**Belanja**

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- (3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Beban**

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian   | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **Aset Tetap**

##### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| <b>Kelompok Aset Tetap</b>             | <b>Masa Manfaat</b> |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun     |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun    |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun      |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun             |

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

| <b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>  | <b>Masa Manfaat (tahun)</b> |
|--|-----------------------------|
| Software Komputer  | 4                           |
| Franchise  | 5                           |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10                          |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                      | 20                          |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                    | 25                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram          | 50                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I  | 70                          |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**Kewajiban**

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**Ekuitas**

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang memperoleh alokasi Anggaran Tahun 2024 awal sebesar Rp.147.810.000,- Selama Semester II tahun 2024 Satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan revisi POK sebanyak empat (4) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

| Uraian                        | 2024               |                         |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                               | ANGGARAN AWAL      | ANGGARAN SETELAH REVISI |
| <b>Pendapatan</b>             |                    |                         |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp 19.480.000      | 19.480.000              |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>      | <b>19.480.000</b>  | <b>19.480.000</b>       |
| <b>Belanja</b>                |                    |                         |
| Belanja Barang                | 147.810.000        | 147.810.000             |
| <b>Jumlah Belanja</b>         | <b>147.810.000</b> | <b>147.810.000</b>      |

**B.1 Pendapatan**

**Realisasi Pendapatan Rp.17.799.000,-**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.17.799.000,- atau mencapai 91,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.19.480.000,- Pendapatan satuan kerja Pengadilan Negeri Sidikalang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.17.799.000,-

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| Uraian                        | Tahun Anggaran 2024 |                   |              |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                               | Anggaran            | Realisasi         | % Real Angg. |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 19.480.000          | 17.799.000        | 91,37        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>19.480.000</b>   | <b>17.799.000</b> | <b>91,37</b> |

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar (58,3) persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan

adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 dan 2023*

| URAIAN                        | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 17.799.000          | 42.693.000          | (58,3)         |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>17.799.000</b>   | <b>42.693.000</b>   | <b>(58,3)</b>  |

*Realisasi  
Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp.17.799.000,-*

### B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.17.799.000,- dan Rp. 42.693.000,- Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II Tahun 2024 dan 2023*

| URAIAN                        | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 17.799.000          | 42.693.000          | (58)           |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>17.799.000</b>   | <b>42.693.000</b>   | <b>(58)</b>    |

### B.2 Belanja

*Realisasi Belanja  
Rp.146.576.225,-*

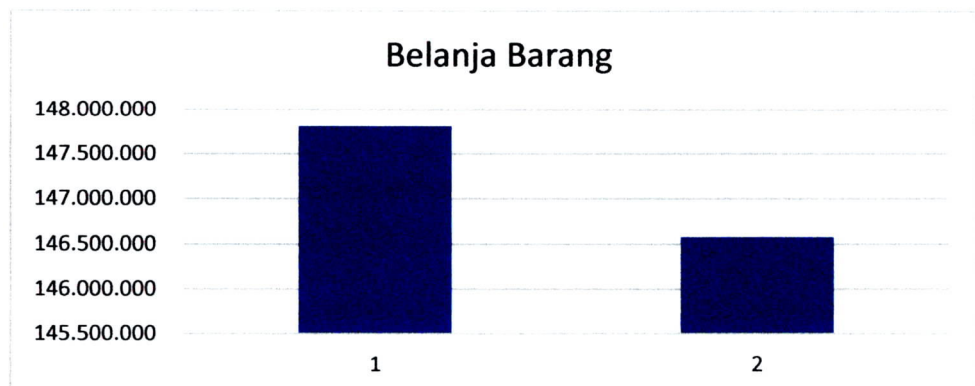
Realisasi Belanja pada Semester II tahun 2024 adalah sebesar Rp.,- atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp.146.576.225,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024*

| URAIAN         | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 |                    |              |
|----------------|--|--------------------|--------------|
|                | Anggaran                                       | Realisasi          | % thdp Angg. |
| Belanja Barang | 147.810.000                                    | 146.576.225        | 99,17        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>147.810.000</b>                             | <b>146.576.225</b> | <b>99,17</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024*



Dibandingkan dengan Semester II tahun 2023, Realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 19.32 %. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

| URAIAN         | REALISASI TA 2024  | REALISASI TA 2023  | NAIK (TURUN) % |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Barang | 146.576.225        | 122.842.500        | 19,32          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>146.576.225</b> | <b>122.842.500</b> | <b>19,32</b>   |

Realisasi  
Belanja Barang  
Rp.146.575.225

### B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.146.576.225,- dan Rp.122.842.500,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 19.32 % dari Realisasi TA 2023.

Realisasi belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja pemeliharaan mengalami kenaikan sementara realisasi belanja barang non operasional, belanja barang persediaan mengalami penurunan.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023

| URAIAN                                    | REALISASI TA 2024  | REALISASI TA 2023  | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja pengiriman surat dinas pos pusat  | 3.620.225          | 2.620.000          | 38,18          |
| Belanja Bahan                             | 35.446.000         | 30.205.000         | 17,35          |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 39.580.000         | 33.237.500         | 19,02          |
| Belanja Jasa Konsultan                    | 36.000.000         | 31.200.000         | 15,38          |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota       | 31.950.000         | 25.580.000         | 24,90          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | <b>146.576.225</b> | <b>122.842.500</b> | <b>19,32</b>   |
| Pengembalian Belanja                      | -                  | -                  |                |
| <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>146.576.225</b> | <b>122.842.500</b> | <b>19,32</b>   |

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan  
Rp.2.217.000,-

### C.1 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.2.217.000,- dan Rp.3.085.500,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

| Jenis           | Realisasi TA 2024 | Realisasi TA 2023 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Barang Konsumsi | 2.217.000         | 3.085.600         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>2.217.000</b>  | <b>3.085.600</b>  |

**Ekuitas**  
**Rp.2.217.000**

### **C.2 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.217.000 dan Rp.3.085.500,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Catatan Penting Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan**  
**Perpajakan Rp0**

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

### **D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

**PNBP**  
**Rp.17.799.000,-**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.17.799.000,- dan Rp.42.693.000,-

### **D.2 Beban Persediaan**

**Beban**  
**Persediaan**  
**Rp.45.370.432,-**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.45.370.432,- dan Rp.35.323.955,-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 28.44 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Semester TA 2024 dan 2023*

| URAIAN                    | REALISASI TA 2024 | REALISASI TA 2023 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 45.370.432        | 35.323.955        | 28,44          |
| <b>Jumlah</b>             | <b>45.370.432</b> | <b>35.323.955</b> | <b>28,44</b>   |

**Beban Barang dan Jasa**  
Rp.75.066.225

### D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.75.066.225,- dan Rp.64.025.000,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,25 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan belanja terdapat pada semua akun belanja

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2024 dan 2023*

| URAIAN                                   | REALISASI TA 2024 | REALISASI TA 2023 | NAIK (TURUN) % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja pengiriman surat dinas pos pusat | 3.620.225         | 2.620.000         | 38,18          |
| Belanja Bahan                            | 35.446.000        | 30.205.000        | 17,35          |
| Belanja Jasa Konsultan                   | 36.000.000        | 31.200.000        | 15,38          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>              | <b>75.066.225</b> | <b>64.025.000</b> | <b>17,25</b>   |
| Pengembalian Belanja                     | -                 | -                 |                |
| <b>Jumlah Belanja</b>                    | <b>75.066.225</b> | <b>64.025.000</b> | <b>17,25</b>   |

**Beban Perjalanan Dinas**  
Rp.31.950.000,-

### D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.31.950.000,- dan Rp.25.580.000,-. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 24,90 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2023 dan 2023*

| URAIAN JENIS BEBAN     | REALISASI TA 2023 | REALISASI TA 2022 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 31.950.000        | 25.580.000        | 24,90          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>31.950.000</b> | <b>25.580.000</b> | <b>24,90</b>   |

### Catatan Penting Laporan Operasional

Tidak ada catatan penting Laporan Operasional dituangkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2024 ini.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal  
Rp.3.085.500,-*

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.085.500,- dan Rp.505.000,-

### E.2 Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defisit LO  
(Rp134.587.657)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.134.587.657,-) dan (Rp.82.235.955). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi  
/Kesalahan  
Mendasar Rp0*

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Koreksi Yang  
Menambah/  
Mengurangi Ekuitas  
Rp0*

### E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### E.5 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp.133.719.157*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.133.719.157,- dan Rp.84.816.455,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024*

| Transaksi Antar Entitas    | Nilai              |
|----------------------------|--------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 146.576.225        |
| Transfer Masuk             | 4.941.932          |
| Diterima dari Entitas Lain | (17.799.000)       |
| <b>Jumlah</b>              | <b>133.719.157</b> |

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*DDEL dan DKEL*

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp.147.576.225,-sedangkan DDEL sebesar Rp (17.799.000),

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer Masuk  
Rp.4.941.000,-*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 setelah penyusutan adalah sebesar Rp4.941.000,-

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
*Rp.2.217.000,-*

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.217.000 dan Rp.3.085.500,-

#### **Catatan Penting Laporan Perubahan Ekuitas**

Tidak ada catatan penting Laporan Perubahan Ekuitas yang perlu dituangkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2024 ini.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 099193

Tgl Data : 06/02/25 12:55 AM  
Tgl Cetak : 06/02/25 9:33 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

| URAIAN  | 2024               |                    |                                    |           | 2023               |                    |                                    |            |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
|   | ANGGARAN           | REALISASI          | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | %         | ANGGARAN           | REALISASI          | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | %          |
| 1   | 2                  | 4                  | 5                                  | 6         | 7                  | 8                  | 9                                  | 10         |
| 2. Dana Alokasi Umum                            | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| 3. Dana Transfer Khusus                         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                    | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik                | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| c. Hibah Kepada Daerah                          | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| 4. Dana Otonomi Khusus                          | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| 6. Dana Desa                                    | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| 7. Insentif Fiskal                              | 0                  | 0                  | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                                  | 0          |
| <b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>       | <b>147,810,000</b> | <b>146,576,225</b> | <b>(1,233,775)</b>                 | <b>99</b> | <b>123,000,000</b> | <b>122,842,500</b> | <b>157,500</b>                     | <b>100</b> |
| <b>C. PEMBIAYAAN</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
kuasa Pengguna Anggaran



**DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM**  
NIP. 198403092011011005

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA**  
**SATUAN KERJA : ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

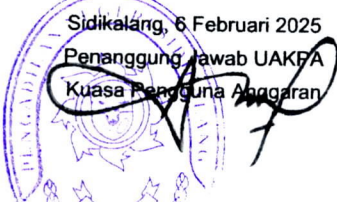
Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM  
Tgl Cetak : 06/02/25 9:33 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

| NAMA PERKIRAAN            | JUMLAH           |                  | Kenaikan (Penurunan) |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           | 2024             | 2023             | Jumlah               | %              |
| 1                         | 2                | 3                | 4                    | 5              |
| <b>ASET</b>               |                  |                  |                      |                |
| <b>ASET LANCAR</b>        |                  |                  |                      |                |
| Persediaan                | 2,217,000        | 3,085,500        | (868,500)            | (28.15)        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b> | <b>2,217,000</b> | <b>3,085,500</b> | <b>(868,500)</b>     | <b>(28.15)</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>        | <b>2,217,000</b> | <b>3,085,500</b> | <b>(868,500)</b>     | <b>(28.15)</b> |

| <b>EKUITAS</b>                      |                  |                  |                  |                |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>EKUITAS</b>                      |                  |                  |                  |                |
| Ekuitas                             | 2,217,000        | 3,085,500        | (868,500)        | (28.15)        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>2,217,000</b> | <b>3,085,500</b> | <b>(868,500)</b> | <b>(28.15)</b> |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | <b>2,217,000</b> | <b>3,085,500</b> | <b>(868,500)</b> | <b>(28.15)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>2,217,000</b> | <b>3,085,500</b> | <b>(868,500)</b> | <b>(28.15)</b> |

Keterangan :  
FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025  
Penanggung Jawab UAKFA  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM  
NIP 198403092011011005

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 9:33 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET       | KREDIT      |
|----------|-----------|---|-------------|-------------|
| 1        | 2         | 3   | 4           | 5           |
| 0.0      | 313111    | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN  | 0           | 146,576,225 |
| 0.0      | 313121    | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN  | 17,799,000  | 0           |
| 3.0      | 425232    | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 0           | 1,550,000   |
| 3.0      | 425233    | Pendapatan Ongkos Perkara   | 0           | 6,120,000   |
| 3.0      | 425239    | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                          | 0           | 10,129,000  |
| 3.0      | 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                            | 3,620,225   | 0           |
| 3.0      | 521211    | Belanja Bahan   | 35,446,000  | 0           |
| 3.0      | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                           | 39,560,000  | 0           |
| 3.0      | 522131    | Belanja Jasa Konsultan  | 36,000,000  | 0           |
| 3.0      | 524113    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                 | 31,950,000  | 0           |
| JUMLAH   |           |   | 164,375,225 | 164,375,225 |

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

  
DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM

198403092011011005

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :** ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI :** ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**WILAYAH/PROVINSI :** ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
**SATUAN KERJA :** ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 9:33 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN      | KODE AKUN | NAMA AKUN   | DEBET              | KREDIT             |
|---------------|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 1             | 2         | 3   | 4                  | 5                  |
| 0.0           | 117111    | Barang Konsumsi   | 2,217,000          | 0                  |
| 0.0           | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain  | 0                  | 146,576,225        |
| 0.0           | 313121    | Diterima dari Entitas Lain  | 17,799,000         | 0                  |
| 0.0           | 313221    | Transfer Masuk  | 0                  | 4,941,932          |
| 0.0           | 391111    | Ekuitas   | 0                  | 3,085,500          |
| 3.0           | 425232    | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 0                  | 1,550,000          |
| 3.0           | 425233    | Pendapatan Ongkos Perkara   | 0                  | 6,120,000          |
| 3.0           | 425239    | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya                          | 0                  | 10,129,000         |
| 3.0           | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                              | 3,620,225          | 0                  |
| 3.0           | 521211    | Beban Bahan   | 35,446,000         | 0                  |
| 3.0           | 522131    | Beban Jasa Konsultan  | 36,000,000         | 0                  |
| 3.0           | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                   | 31,950,000         | 0                  |
| 3.0           | 593111    | Beban Persediaan konsumsi   | 45,370,432         | 0                  |
| <b>JUMLAH</b> |           |   | <b>172,402,657</b> | <b>172,402,657</b> |

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM

NIP 198403092011011005

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
**SATUAN KERJA** : ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 9:32 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN  | 2024       | 2023       | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|---|------------|------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL  | 0          | 0          | 0                      |          |
| PENDAPATAN OPERASIONAL  | 0          | 0          | 0                      |          |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN   | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Cukai  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Masuk  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Keluar   | 0          | 0          | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0          | 0          | 0                      |          |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)              | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                         | 17,799,000 | 42,693,000 | (24,894,000)           | (58.309) |
| Pendapatan Badan Layanan Umum                                 | 0          | 0          | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 17,799,000 | 42,693,000 | (24,894,000)           | (58.309) |
| PENDAPATAN HIBAH  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Pendapatan Hibah  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0          | 0          | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan   | 17,799,000 | 42,693,000 | (24,894,000)           | (58.309) |
| BEBAN OPERASIONAL   | 0          | 0          | 0                      |          |
| Beban Pegawai   | 0          | 0          | 0                      |          |
| Beban Persediaan  | 45,370,432 | 35,323,955 | 10,046,477             | 28.441   |
| Beban Barang dan Jasa   | 75,066,225 | 64,025,000 | 11,041,225             | 17.245   |
| Beban Pemeliharaan  | 0          | 0          | 0                      |          |
| Beban Perjalanan Dinas  | 31,950,000 | 25,580,000 | 6,370,000              | 24.902   |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda         | 0          | 0          | 0                      |          |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
**SATUAN KERJA** : ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 9:32 AM

Halaman : 2

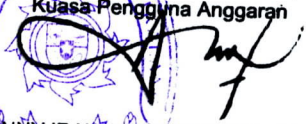
lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN  | 2024                 | 2023                | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)           |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Beban Pembayaran Bunga Utang                                | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Subsidi   | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Hibah   | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Bantuan Sosial  | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                       | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Transfer ke Daerah                                    | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Lain-Lain   | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>   | <b>152,386,657</b>   | <b>124,928,955</b>  | <b>27,457,702</b>      | <b>21.979</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>            | <b>(134,587,657)</b> | <b>(82,235,955)</b> | <b>(52,351,702)</b>    | <b>63.66</b>  |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |               |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                              | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Pendapatan Pelepasan Aset                                   | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Pelepasan Aset  | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang       | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang            | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                 | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                 | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |               |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               | <b>(134,587,657)</b> | <b>(82,235,955)</b> | <b>(52,351,702)</b>    | <b>63.66</b>  |
| POS LUAR BIASA  | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| Beban Luar Biasa  | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| POS LUAR BIASA  | 0                    | 0                   | 0                      |               |
| <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                 | <b>(134,587,657)</b> | <b>(82,235,955)</b> | <b>(52,351,702)</b>    | <b>63.66</b>  |

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM  
NIP 198403092011011005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0700 ) SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : ( 099193 ) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 06/02/25 9:33 AM


Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

| URAIAN                                   | 2024          | 2023         | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|--|---------------|--------------|------------------------|----------|
| EKUITAS AWAL                             | 3,085,500     | 505,000      | 2,580,500              | 510.99   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                       | (134,587,657) | (82,235,955) | (52,351,702)           | 63.66    |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0             | 0            | 0                      | 0        |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                   | 0             | 0            | 0                      | 0        |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                  | 133,719,157   | 84,816,455   | 48,902,702             | 57.66    |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS               | (868,500)     | 2,580,500    | (3,449,000)            | (133.66) |
| EKUITAS AKHIR                            | 2,217,000     | 3,085,500    | (868,500)              | (28.15)  |

Keterangan :

FINAL

Sidikalang, 6 Februari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM  
NIP 198403092011011005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN  
UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten  
Dairi, Sumatera Utara Kode Pos 22212

[www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN (03)**

Nomor: 2065 /SEK.PN.W2-U14/PL1.2.7/XII/2024

Nama Satker : Pengadilan Negeri Sidikalang  
Kode Satker : 0050700098654000KD  
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Medan  
UAPPB-EI : Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024), bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sidikalang, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panitia Opname Fisik Persediaan:

1. Nama : Danny Irawan Manurung, S.Kom  
NIP : 19840309 201101 1 005  
Jabatan : Sekretaris
2. Nama : Redia Sianturi, S.E.  
NIP : 19860729 201903 2 004  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan
3. Nama : Monika Desi Deria Nainggolan  
NIP : -  
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Periode Semester II Tahun 2024, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil opname fisik. Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Danny Irawan Manurung, S.Kom. :

2. Redia Sianturi, S.E. :

3. Monika Desi Deria Nainggolan :

Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Barang  
Pengadilan Negeri Sidikalang



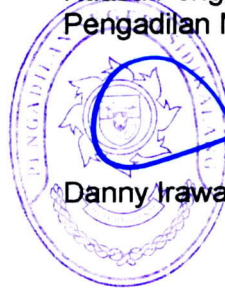
Danny Irawan Manurung, S.Kom.

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN (03)  
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024

Nama Satker : Pengadilan Negeri Sidikalang  
Kode Satker : 0050700098654000KD  
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Medan  
UAPPB-EI : Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI

| No | Nama Barang                 | Kode Barang | Satuan         | Kuantitas Barang           |                   | Selisih | Kondisi |       |       |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|-------|-------|
|    |                             |             |                | Menurut Laporan Persediaan | Hasil Check Fisik |         | Baik    | Usang | Rusak |
| 1. | Alat Tulis                  | 1010301001  | Kotak          | 11                         | 11                | -       | B       | -     | -     |
| 2. | Odner Dan Map               | 1010301006  | Lembar         | 5                          | 5                 | -       | B       | -     | -     |
| 3. | Alat Perekat                | 1010301010  | Kotak          | 2                          | 2                 | -       | B       | -     | -     |
| 4. | Kertas HVS                  | 1010302001  | Rim            | 5                          | 5                 | -       | B       | -     | -     |
| 5. | Berbagai Kertas             | 1010302002  | Bungkus        | 3                          | 3                 | -       | B       | -     | -     |
| 6. | Kertas Cover                | 1010302003  | Bungkus/lembar | 7                          | 7                 | -       | B       | -     | -     |
| 7. | Amplop                      | 101302004   | Bungkus        | 5                          | 5                 | -       | B       | -     | -     |
| 8. | Computer File/Tempat Disket | 1010304002  | Bungkus        | 1                          | 1                 | -       | B       | -     | -     |
| 9. | Tinta/Toner Printer         | 1010304004  | Kotak          | 6                          | 6                 | -       | B       | -     | -     |

Sidikalang, 31 Desember 2024  
Kuasa Pengguna Barang  
Pengadilan Negeri Sidikalang



Danny Irawan Manurung, S.Kom.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 099193  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

| No | Jenis Rekon  | Nilai SPAN  | Nilai SAKTI | Selisih |
|----|--|-------------|-------------|---------|
| 1  | Pagu Belanja   | 147,810,000 | 147,810,000 | 0       |
| 2  | Belanja  | 146,576,225 | 146,576,225 | 0       |
| 3  | Pengembalian Belanja                                 | 0           | 0           | 0       |
| 4  | Estimasi Pendapatan                                  | 19,480,000  | 19,480,000  | 0       |
| 5  | Pendapatan Bukan Pajak                               | 17,799,000  | 17,799,000  | 0       |
| 6  | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak                  | 0           | 0           | 0       |
| 7  | Pengembalian Pajak                                   | 0           | 0           | 0       |
| 8  | Mutasi Uang Persediaan                               | 0           | 0           | 0       |
| 9  | Kas di Bendahara Pengeluaran                         | 0           | 0           | 0       |
| 10 | Kas pada Badan Layanan Umum                          | 0           | 0           | 0       |
| 11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah                        | 0           | 0           | 0       |
| 12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga | 0           | 0           | 0       |

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 06-FEB-25*



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
SEMESTER II TAHUN 2024**

Kode dan Nama UAKPA : ( 099193 ) PENGADIAN NEGERI SIDIKALANG

Kode dan Nama UAPPAW : ( 401777 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Kode dan Nama E1 : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Kode dan Nama K/L: ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG RI

| Objek Penelaahan   |  | Kondisi LK  |              | Seharusnya        |
|--|--|-------------|--------------|-------------------|
| Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A  |  |             |              |                   |
| Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran  |  |             |              |                   |
| <b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>  |  |             |              |                   |
|  | <b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>   | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Pernyataan Tanggung Jawab  | √           |              | Ada               |
| 2  | Face LRA, Neraca, LO dan LPE   | √           |              | Ada               |
| 3  | Catatan atas Laporan Keuangan  | √           |              | Ada               |
|  |  | √           |              |                   |
|  | <b>Laporan Keuangan Tambahan</b>   | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal  | √           |              | Ada               |
| 2  | Neraca Percobaan Akrua   | √           |              | Ada               |
| 3  | Neraca Percobaan Kas   | √           |              | Ada               |
| 4  | Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun  | √           |              | Ada               |
| <b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>   |  |             |              |                   |
|  | <b>Kesesuaian Saldo</b>  | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1.   | Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI   | √           |              | Sama              |
| Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya. |  |             |              |                   |
| <b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>   |  |             |              |                   |
|  | <b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>   | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE  | √           |              | Sama              |
| 2  | Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca  | √           |              | Sama              |
| 3  | Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas  | √           |              | Sama              |
| <b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>  |  |             |              |                   |
|  | <b>To Do List</b>  | <b>Ya</b>   | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan  |             | √            | Tidak             |
| 2  | Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)  |             |              | Ya                |
| 3  | Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan   |             | √            | Tidak             |
| 4  | Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan  |             | √            | Tidak             |
| 5  | Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) |             | √            | Tidak             |
| 6  | Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan   |             | √            | Tidak             |
| 7  | Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan   |             | √            | Tidak             |
| 8  | Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan  |             | √            | Tidak             |
| 9  | Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)      |             | √            | Tidak             |
| 10   | Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang   |             | √            | Tidak             |
| 11   | Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan   |             | √            | Tidak             |
| 12   | Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan  |             | √            | Tidak             |
| Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah  |  |             |              |                   |
|  | <b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>   | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?   |             | √            | Tidak             |
| 2  | Adakah "TDK COA" yang BEDA?  |             | √            | Tidak             |
| 3  | Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?   |             | √            | Tidak             |
|  | a. Pagu/DIPA   |             | √            | Tidak             |
|  | b. Estimasi PNPB   |             | √            | Tidak             |
|  | c. Belanja   |             | √            | Tidak             |
|  | d. Pengembangan Belanja  |             | √            | Tidak             |
|  | e. Pendapatan  |             | √            | Tidak             |
|  | f. Pengembangan Belanja  |             | √            | Tidak             |
|  | g. Kas BLU   |             | √            | Tidak             |
|  | h. Kas di Bendahara Pengeluaran  |             | √            | Tidak             |

|   |  |            |              |                   |
|---|--|------------|--------------|-------------------|
|   | i. Kas Hibah   |            | √            | Tidak             |
|   | j. Pengesahan Hibah Langsung   |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Rekon Internal</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Terdapat Selisih Rekon Internal  |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Daftar MONSAKTI</b>   | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)  |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2   | Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)  |            | √            | Ada/Tidak         |
| 3   | Adakah Neraca Tidak Balance?   |            | √            | Tidak             |
| 4   | Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)   |            | √            | Tidak             |
| 5   | Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?  |            | √            | Tidak             |
| 6   | Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)  |            | √            | Tidak             |
| <b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b> |  |            |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>   | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1.  | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual  |            | √            | Tidak             |
| 2   | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas   |            | √            | Tidak             |
| 3   | Terdapat Saldo bernilai desimal  |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>   | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)   | √          |              | Ya                |
| 2   | Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)   | √          |              | Ya                |
| 3   | Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)   | √          |              | Ya                |
| 4   | Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)  | √          |              | Ya                |
| 5   | Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)   | √          |              | Ya                |
| 6   | Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)   | √          |              | Ya                |
| 7   | Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)  | √          |              | Ya                |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)   |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2   | Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)   |            | √            | Tidak             |
| 3   | Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)   |            | √            | Tidak             |
| 4   | Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain  |            | √            | Tidak             |
| 5   | Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"   |            | √            | Tidak             |
| 6   | Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar  |            | √            | Tidak             |
| 7   | Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)  |            | √            | Tidak             |
| 8   | Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)   |            | √            | Tidak             |
| 9   | Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN   |            | √            | Tidak             |
| 10  | Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)   |            | √            | Tidak             |
| 11  | Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)  |            | √            | Tidak             |
| 12  | Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)  |            | √            | Tidak             |
| 13  | Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC) |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Jika Bukan Satker BLU</b>   | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"   |            | √            | Tidak             |
| 2   | Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)  |            | √            | Tidak             |
| 3   | Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)  |            | √            | Tidak             |
| 4   | Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)   |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Terkait Satker BLU</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)   |            | √            | Ada/Tidak         |
|   | Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah   |            |              |                   |
| 2   | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)   |            | √            | Tidak             |
|   |  |            |              |                   |
|   | <b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>   | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |

|   |   |            |              |                   |
|---|---|------------|--------------|-------------------|
| 1   | Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial |            | √            | Tidak             |
| 2   | Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI   |            | √            | Tidak             |
|   |   |            |              |                   |
|   | <b>Hibah Langsung</b>   | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
|   | Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya  |            | √            | Ada/Tidak         |
| 1   | Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.  |            |              | Ada/Tidak         |
| 2   | Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)  |            |              | Ada/Tidak         |
| 3   | Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)         |            |              | Ya                |
| 4   | Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?  |            |              | Ya                |
| 5   | Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?   |            |              | Ya                |
|   | Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya   |            |              | Ada/Tidak         |
| 1   | Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang  |            |              | Ya                |
|   |   |            |              |                   |
|   | <b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>  |            |              |                   |
| 1   | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI  |            |              |                   |
| 2   | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)   |            |              |                   |
| 3   | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)  |            |              | Tidak             |
|   |   |            |              |                   |
|   | <b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?  |            | √            | Ya/Tidak          |
| 2   | Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?   |            |              | Ya/Tidak          |
| 3   | Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?  |            |              | Ya                |
|   |   |            |              |                   |
|   | <b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)  |            | √            | Ya/Tidak          |
| 2   | Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?  |            |              | Ya/Tidak          |
|   | Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk  |            |              |                   |
|   |   |            |              |                   |
|   | <b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah   |            | √            | Ya/Tidak          |
| <b>PENGECEKAN NERACA</b>                    |   |            |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya  | √          |              | Ya                |
| 2   | Saldo pada neraca bernilai wajar  | √          |              | Ya                |
| 3   | Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN  | √          |              | Ya                |
| 4   | Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening   | √          |              | Ya                |
| 5   | Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito   | √          |              | Ya                |
| 6   | Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?  |            | √            | Tidak             |
| 7   | Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?   | √          |              | Ya                |
| 8   | Terdapat saldo bernilai desimal   |            | √            | Tidak             |
|   |   |            |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>       |   |            |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Pos-pos LO</b>  | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1   | Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)  |            | √            | Tidak             |
| 2   | Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,                                  |            | √            | Tidak             |
| 3   | Terdapat kodefikasi atau uraian akun null   |            | √            | Tidak             |
| 4   | Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang  | √          |              | Ya                |
| 5   | Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?  | √          |              | Ya/Tidak          |
| 6   | Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar   | √          |              | Ya/Tidak          |
| 7   | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?   |            | √            | Tidak             |
|   |   |            |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> |   |            |              |                   |

| <b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>  |  |           | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
|--|--|-----------|--------------|-------------------|
| 1  | "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"  | √         |              | Ya                |
| 2  | Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3  | Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP   |           | √            | Tidak             |
| 4  | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  |           | √            | Tidak             |
| <b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>  |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?  | √         |              |                   |
|  | Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST                               |           |              |                   |
| 2  | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)  | √         |              | Ya                |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRAB/P)</b>   |  |           |              |                   |
| <b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>  |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Terdapat saldo negatif di LRAB   |           | √            | Tidak             |
| 2  | Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)  |           | √            | Tidak             |
| 3  | Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya   |           | √            | Tidak             |
| 4  | Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"  |           | √            | Tidak             |
| 5  | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?  |           | √            | Tidak             |
| 6  | Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)   | √         |              | Ya/Tidak          |
| 7  | Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | √         |              | Ya                |
| <b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>   |  |           |              |                   |
| <b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b> |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :  |           | √            | Ya/Tidak          |
|  | - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)   |           |              | Ya/Tidak          |
|  | - Beban Penyisihan Piutang (di LO)   |           |              | Ya/Tidak          |
|  | - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang  |           |              | Ya/Tidak          |
| 2  | Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :  |           | √            | Ya/Tidak          |
|  | - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang   |           |              | Ya/Tidak          |
| 3  | Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :   | √         |              | Ya/Tidak          |
|  | - Beban Persediaan (di LO)   |           |              | Ya/Tidak          |
| 4  | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :  | √         |              | Ya/Tidak          |
|  | - Akumulasi AT/AL (Neraca)   |           |              | Ya/Tidak          |
|  | - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)  |           |              | Ya/Tidak          |
| 5  | Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?   |           | √            | Ya/Tidak          |
|  | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?  |           |              | Ya                |
| <b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>  |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?   |           | √            | Ya/Tidak          |
|  | Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas   |           |              | Ya                |
| 2  | Apakah ada Beban Bansos ?  |           | √            | Ya/Tidak          |
|  | Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas   |           |              | Ya                |
| <b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b>   |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 2  | Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)   |           |              | Ya/Tidak          |
|  | - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3  | Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 4  | Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)  | √         |              | Ya/Tidak          |
|  | - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua  | √         |              | Ya/Tidak          |
| 5  | Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua   | √         |              | Ya/Tidak          |
| <b>TELAAH LK BLU</b>   |  |           |              |                   |
| <b>LPSAL BLU</b>   |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?   | √         |              | Ya                |
| 2  | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?   |           | √            | Tidak             |
| 3  | Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?  | √         |              | Ya                |
| 4  | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?   | √         |              | Ya                |
| 5  | Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA   | √         |              | Ya                |
| 6  | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?  | √         |              | Ya                |
| <b>LAK BLU</b>   |  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |

|   |   |   |  |    |
|---|---|---|--|----|
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU? | √ |  | Ya |
| 2 | Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?  | √ |  | Ya |
| 3 | Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca  | √ |  | Ya |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU                                  | √ |  | Ya |
| 5 | Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca   | √ |  | Ya |
| 6 | Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca   | √ |  | Ya |
| 7 | Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU  | √ |  | Ya |

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk*

**Mengetahui**  
**Pejabat Penyusun LKKL,**



**REDIA SIANTURI, S.E**  
**NIP.198607292019032004**



**Sidikalang, 12 Februari 2025**  
**Penelaah,**



**DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom**  
**NIP .198403092011011005**









